

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai Katalisator Good Governance dan Akuntabilitas Sektor Publik: Tinjauan Sistematis Literatur dan Agenda Penelitian Masa Depan

Feranika Meilinda, Novi Dinda Arifia

Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surabaya

feranikameilindaaa@gmail.com, novidindaarifia@gmail.com

Published: December, 2025

ABSTRACT

In order to thoroughly examine and compile the body of research on the function of the Accounting Information System (AIS) as a catalyst for Good Governance (GG) and Accountability in the public sector, this study does a Systematic Literature Review (SLR). The major goals are to ascertain the key obstacles and opportunities in attaining real-time accountability in Indonesia (RQ2) and to identify the most important AIS aspects (input, process, and output) driving public sector accountability (RQ1). AIS quality, apparatus competency, and the efficacy of internal control systems are the most important factors that consistently affect the quality and timeliness of public financial statements, acting as the fundamental mechanism for accountability, according to the synthesis, which uses a strict screening protocol across multiple academic databases. The evaluation does, however, draw attention to widespread implementation issues, which are mostly caused by weak organizational commitment, user resistance, and inconsistent ethical standards among public officials. In order to close the gap between theoretical potential and real-world application for sustainable good governance, these findings not only resolve the contradictions in earlier research but also produce a Future Research Agenda that suggests a move toward Action Research and the study of cutting-edge technologies (like Blockchain or Big Data Analytics) in AIS.

Keywords: SIA, Good Governance, Akuntabilitas, Sektor Publik, Systematic Literature Review

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tuntutan akuntabilitas tersebar luas, tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai upaya penting untuk mencegah kerugian negara dan memastikan bahwa kebijakan publik selaras dengan peraturan. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam kerangka hukum administrasi negara dan regulasi keuangan publik Indonesia, termasuk Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Meskipun aturan dan sistem seperti SIPD atau SAP Desa telah diterapkan, praktik di lapangan terus menunjukkan masalah implementasi yang terus-menerus, mulai dari budaya birokrasi hingga masalah teknis seperti keamanan data, yang menghambat tanggung jawab langsung sektor publik. Sangat penting bagi penelitian ini untuk secara sistematis menganalisis dan mensintesis hasil literatur saat ini karena ada perbedaan yang signifikan antara realitas implementasi SIA dan potensi teoritisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dimensi SIA yang paling penting (RQ1) dan faktor penghambat dan peluang utama (RQ2). Informasi ini kemudian akan digunakan untuk membuat agenda penelitian masa depan yang berfokus untuk meningkatkan efektivitas peran SIA.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian sebelumnya tentang bagaimana Sistem Informasi Akuntansi (SIA) membantu meningkatkan akuntabilitas dan pemerintahan yang baik di sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga akan membangun agenda

penelitian yang relevan untuk digunakan di masa depan. Fokus penelitian adalah untuk menjawab dua pertanyaan utama:

RQ (1): Dimensi atau variabel SIA (input, proses, output) mana yang memengaruhi akuntabilitas dan pemerintahan yang baik di sektor publik secara paling signifikan?

RQ (2): Faktor-faktor apa yang merupakan hambatan dan peluang utama SIA untuk mencapai tanggung jawab real-time di Indonesia?

TINJUAN LITERATUR

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik telah berkembang dari sekadar kumpulan software dan prosedur untuk mencatat transaksi keuangan menjadi sistem manajemen informasi yang terintegrasi yang bertanggung jawab atas pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaporan. SIA pemerintahan adalah sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memproses data ekonomi, seperti perencanaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta perubahan aset, dan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas tinggi, tepat waktu, andal, dan mudah dipahami untuk stakeholder internal dan eksternal. Dalam pemerintahan Indonesia, SIA telah diterapkan melalui berbagai sistem terpusat. Beberapa di antaranya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang menangani perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah, dan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa (SAPDesa), yang mengatur dana desa. Dengan demikian, peran SIA telah menjadi prasyarat untuk mewujudkan tuntutan akuntabilitas publik.

Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI) mendefinisikan Good Governance (GG) dalam administrasi publik sebagai tata kelola yang bertanggung jawab, efektif, dan terlibat. Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan adalah prinsip yang paling penting dari GG, dan terkait langsung dengan SIA. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opininya, yang merupakan standar formal untuk tingkat pertanggungjawaban pemerintah, adalah tempat dimensi ini mencapai puncaknya.

Transparansi dan Keterbukaan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan pengawasan, sementara akuntabilitas berfokus pada pertanggungjawaban setelah transaksi terjadi. Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dan keuangan, termasuk realisasi anggaran, dapat diakses secara luas dan mudah dipahami oleh publik. Ini mengurangi kemungkinan korupsi dan praktik maladministrasi. Dalam hal ini, Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah alat penting. Pemerintah mendorong penerapan sistem seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena mereka dapat mencatat data keuangan secara elektronik, memberikan informasi dalam waktu nyata, dan mempublikasikan hasil pelaporan kepada masyarakat. Ini secara langsung meningkatkan transparansi dan keterbukaan dan, pada akhirnya, mendorong tetapnya Good Governance.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) di sektor publik berfungsi sebagai katalisator atau mekanisme mediasi antara kebijakan tata kelola yang ditetapkan dan realisasi luaran Good Governance (GG), khususnya Akuntabilitas Keuangan. Teori keagenan di sektor publik menjelaskan peran katalisator SIA dengan mengurangi asimetri informasi antara masyarakat (prinsipal) dan pemerintah (agen). Salah satu fitur utama SIA adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Audit Trail. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SIA dirancang untuk mengintegrasikan SPI dengan fungsi kontrol otomatis untuk memastikan bahwa transaksi diproses sesuai otorisasi, mengurangi risiko penipuan, dan meningkatkan keamanan data. Sementara itu, fitur Audit Trail yang dibuat oleh SIA (misalnya, dalam sistem seperti SIPD atau Siskeudes) mencatat setiap input data, modifikasi, dan otorisasi secara kronologis. Ini memungkinkan BPK untuk melacak transaksi kembali ke sumbernya, memverifikasi kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan pada akhirnya menghasilkan Laporan Keuangan yang kredibel dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, efektivitas SIA, yang ditentukan oleh kualitas fiturnya, kemampuan pengguna, dan komitmen organisasi, adalah faktor perantara yang menentukan sejauh mana kebijakan akuntabilitas dapat diterjemahkan menjadi praktik GG yang nyata.

METODE TINJUAN LITERATUR SISTEMATIS

Penelitian ini menggunakan metodologi Systematic Literature Review (SLR), yang didasarkan pada prinsip transparansi, replikasi, dan meminimalkan bias. Metodologi ini sesuai dengan kerangka kerja standar yang dikenal sebagai PRISMA (Pilihan Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Perencanaan, Identifikasi, Penyaringan, dan Sintesis adalah empat tahap utama dari prosedur SLR ini.

Tabel Ekstraksi Data

Table 1.Ekstraksi data

	Judul Artikel	Penulis /Tahun	Objek Penelitian	Metodologi	Variabel SIA yang Diuji	Variabel Outcome	Hasil Utama
1	Peran etika dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik pada situasi bencana di Indonesia	Andri Sulistyono, Denok Kurniasih / 2024	Peran etika dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik selama situasi bencana di Indonesia	kuantitatif	Etika dan akuntabilitas pelayanan publik.	Akuntabilitas pelayanan publik	Hambatan tekanan politik dan budaya organisasi
2	Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia	Dedeng Yusuf Maolani, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani & Eka Fikry Al Huda (2023)	Peran sistem akuntabilitas publik sebagai upaya penanganan dan pencegahan korupsi dan nepotisme untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan <i>good governance</i> di Indonesia	kualitatif	Sistem Akuntabilitas PublikSistem Akuntabilitas Publik	Good Governance (GG)Good Governance	penerapan sistem akuntabilitas publik memiliki hubungan yang signifikan dengan upaya penanganan korupsi dan perwujudan <i>good governance</i> meskipun dalam praktiknya belum sempurnaAkuntabilitas publik meningkatkan <i>good governance</i> namun belum optimal.
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Fauziah Husain, Hisantia	Pemerintah Kota Gorontalo	kualitatif	• Sistem Pengendalian	•Transparansi	Transparansi dan akuntabilitas

	as dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo 2021–2023	wati Guhung, Nurlian Jerita, Nur Hikmah Dai, & Ziamudin Gustia Rahim / 2025	(laporan keuangan tahun 2021–2023)		Intern Pemerintah (SPIP) • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan	• Akuntabilitas • Kemandirian keuangan daerah	meningkat, namun detail data laporan masih terbatas
4	Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara	Syabran Jabar, Aldri Frinaldi, & Roberia / 2024	Lembaga pemerintahan (kajian hukum administrasi negara)	kualitatif	Akuntabilitas dan Transparansi (sebagai prinsip SIA)	Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan	Regulasi kuat, tapi implementasi masih lemah di birokrasi.
5	Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Andri Yuliyanto / 2023	Pemerintah daerah di Indonesia	kualitatif	Prinsip Good Governance (Transparansi, Akuntabilitas, Efisiensi, Partisipasi)	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Penerapan good governance belum maksimal di daerah.
6	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Atik Andhayani / 2020	Pemerintah Kota Batu	kualitatif	e-Budgeting (bagian dari SIA Pemerintah)	Akuntabilitas Pemerintah Daerah	e-Budgeting meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun masih terkendala SDM dan koordinasi.

7	Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	Oryza Ardhiarisa, Endro Sugiartono, Riza Puspita Sari / 2023	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	kuantitatif	pemanfaatan SIA	Kualitas Laporan Keuangan	Pemanfaatan SIA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8	Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur	Tumija & Akhmad Zakky Ramadhana (2023)	Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur	kualitatif	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Efektivitas perencanaan anggaran daerah	SIPD dinilai efektif dalam enam dimensi: kegunaan, ketepatan dan objektivitas, ruang lingkup, efisiensi biaya, akuntabilitas, dan ketepatan waktu. Hambatan: keterlambatan input data OPD, dokumen fisik terlalu tebal, keterbatasan akses, serta lambatnya verifikasi TAPD.
9	Implementasi Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE) Dalam Rangka Mewujudkan Sistem	Desy Tri Setyorini, Supriyanto, Sarpan (2025)	Pemerintah Kota Probolinggo	kualitatif	Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE)	Tingkat implementasi SPBE dan peningkatan indeks SPBE	Implementasi SIA SPBE meningkatkan indeks SPBE Kota Probolinggo dari 3,1 menjadi 4,04 (+30,3%) dan level arsitektur dari 1 ke 4. Kendala utama: keterbatasan SDM,

	Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi di Pemerintah Kota Probolinggo						infrastruktur, koordinasi, dan anggaran. Dibutuhkan penguatan di empat aspek tersebut untuk optimalisasi SPBE.
10	Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Siskeudes	Adhi Susano & Meida Rachmawati (2024)	Pemerintah desa di Indonesia	kualitatif	Siskeudes	Transparansi & akuntabilitas keuangan desa	Siskeudes meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.
11	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Infaq terhadap Minat Masyarakat Berinfak	Binti Tasmiah & Dewi Febriani (2024)	Masjid Hurriyah Adlin	kuantitatif	Transparansi & akuntabilitas	Minat berinfaq masyarakat	Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan.
12	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual di Provinsi Jawa Barat	Venti Eka Satya (2020)	Pemprov Jawa Barat	kualitatif	Sistem akuntansi berbasis akrual	Efektivitas implementasi sistem	Penerapan akrual efektif; terkendala SDM dan integrasi sistem.
13	Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution	Wisnu Prabhawa & Eko Prasojito (2021)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	kualitatif	Penggunaan SIPTL, dukungan APIP, proses pemeriksaan keuangan (aspek SIA)	Integritas, Transparansi, Akuntabilitas	Integritas BPK terhambat oleh SDM, independensi, dan persepsi publik; perlu penguatan sistem informasi dan

							dukungan internal.”
14	Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah dan Kualitas Layanan Pendidikan di SMA Negeri Kabupaten Kaur	Khoirunnisa Nurul Habibatulloh, Slamet Widodo, Trisna Murni (2021)	SMA Negeri di Kabupaten Kaur (Akreditasi A, B, C)	kuantitatif	Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah (bagian dari prinsip SIA)	Kualitas Layanan Pendidikan	Akuntabilitas dan transparansi meningkatkan kualitas layanan pendidikan
15	Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI)	Komite Nasional Kebijakan Governance – Mardiasmo, Eko Prasojodkk. (2022)	Organisasi sektor publik di Indonesia	Kajian normatif / pedoman kebijakan	Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Whistleblowing, Anti-gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (unsur SIA)	Tata Kelola Keuangan & Kinerja Sektor Publik	PUG-SPI memperkuat tata kelola publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.
16	Tantangan dan Solusi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Indonesia: Sebuah Analisis Tematik	Della Hilia Anriva (2024)	Penerapan SIA pada perusahaan dan UKM di Indonesia	kualitatif	Komponen dan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (efisiensi, akurasi, transparansi, kepatuhan)	Efisiensi operasional, akurasi data, transparansi, dan kepatuhan regulasi	SIA meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun perlu dukungan pelatihan dan manajemen untuk mengatasi keterbatasan.
17	Peran Sistem Informasi	Suci Khairani, Kiki	Instansi pemerintah / sektor	Studi kepustakaan	Sistem Informasi Akuntansi	Transparansi, Akuntabilitas	.AIS meningkatkan efisiensi,

	Akuntansi Dalam Tata Kelola Keuangan di Sektor Publik	Yulanda, Eka Nurmala Sari (2025)	publik Indonesia	(literature review)	i (AIS): SIMDA, aplikasi keuangan , kontrol internal	tas, Efisiensi, Integritas	transparansi, dan akuntabilitas keuangan publik
18	Integrasi Audit Trail dan Pengendalian Internal Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi	Miko Tri Afandi, Intan Ayu, Ahmad Mishbahul Munir, Atikah Kusuma Wati (2025)	KSPP Syariah Mawar Simo, Lamongan	kualitatif	Audit Trail, Pengendalian Internal (komponen SIA)	Loyalitas Anggota, Kepercayaan, Akuntabilitas	Audit trail dan kontrol internal meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan loyalitas anggota.
19	Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara	Amiroh Kamilah Namora Lubis, Yetty Sembiring, Fitri Yull Dewi Martha, Rozali Ilham (2025)	Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Padangsidimpuan Utara	kualitatif	Efektivitas penggunaan sistem informasi keuangan (SIPD)	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	SIPD efektif mendukung pelaporan keuangan, namun perlu peningkatan SDM dan infrastruktur
20	Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public	Adolf Z.D. Siahay (2023)	Akuntansi sektor publik (global, termasuk konteks Indonesia)	SLR- Kualitatif	Praktik akuntansi sektor publik (berbasis akrual, IPSAS)	Transparansi informasi keuangan, akuntabilitas institusional, kepercayaan publik	Akuntansi publik transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan serta integritas lembaga

	Sector Accounting						
--	----------------------	--	--	--	--	--	--

SINTESIS TEMATIK

Table 2.Sintesis Tematik

Sub-Bab Arikel	Pertanyaan Kunci yang Dijawab	Fokus Tematik yang Harus Dibuat
RQ 1	Variabel SIA mana yang paling sering diuji dan selalu terbukti signifikan terhadap Good Governance /Akuntabilitas?	Variabel teknis SIA (SIPD/Siskeudes) dan SPI adalah pilar operasionalnya, namun efektivitasnya sangat bergantung pada variabel Kompetensi SDM yang menjadi <i>bottleneck</i> utama.
RQ 2	Apa saja masalah non teknis yang dominan dan menghambat <i>real-time accountability</i> ?	Hambatan terbesar Akuntabilitas bergeser dari masalah regulasi ke masalah implementasi . Tantangan paling kritis adalah mengelola faktor manusia (SDM/Etika) dan proses (Orgware/Koordinasi) , bukan lagi kendala teknis <i>software</i> .

PEMBAHASAN

Kesenjangan Implementasi: Dari Variabel Ideal (RQ1) Menuju Tantangan Nyata (RQ2)

Sintesis temuan literatur terkait RQ1 secara konsisten mengidentifikasi tiga variabel SIA yang paling dominan memengaruhi Akuntabilitas dan Kualitas Laporan Keuangan, yaitu Kompetensi Aparatur, Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terintegrasi, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Studi-studi empiris menegaskan bahwa sistem SIA seperti SIPD dan Siskeudes, yang secara inheren dirancang untuk mendukung ketiga variabel ini (misalnya, melalui fitur otomatisasi dan audit trail), memiliki potensi teoritis yang tinggi untuk mewujudkan Good Governance. Namun, ketika dihadapkan pada realitas implementasi (analisis RQ2), terungkap adanya kesenjangan signifikan antara potensi sistem dan hasil actual. Tantangan utama implementasi tidak lagi bersifat teknis (seperti kerusakan server), melainkan bersifat manajerial dan kultural, mencakup isu seperti kurangnya komitmen pimpinan terhadap penggunaan sistem secara penuh, resistensi aparatur terhadap perubahan proses kerja yang baru, dan yang paling mendasar, rendahnya kesadaran etika dan integritas yang menghambat transparansi sejati. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa SIA hanya dapat berfungsi secara optimal sebagai katalisator GG apabila variabel Non-Sistem telah dikelola dengan baik.

Hubungan Mediasi: SIA sebagai Cermin Kualitas SDM dan Tata Kelola

Hubungan antara RQ1 dan RQ2 dapat dijelaskan sebagai hubungan mediasi di mana SIA bertindak sebagai cermin diagnostik kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Tata Kelola. Sebagai contoh, SIA memang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap SAP (variabel RQ1), namun efektivitas SIA dalam menghasilkan Laporan Keuangan Berkualitas (output Akuntabilitas) secara langsung ditentukan oleh Kompetensi Aparatur. Studi kasus di tingkat desa menunjukkan bahwa meskipun Siskeudes telah diterapkan, keterlambatan pelaporan atau ketidakakuratan data (tantangan RQ2) seringkali disebabkan oleh minimnya bimbingan teknis dan pelatihan yang tidak memadai, bukan oleh kegagalan sistem itu sendiri. Oleh karena itu, sintesis ini menegaskan bahwa SIA harus diubah dari sekadar alat administratif menjadi katalisator Good Governance yang efektif. Penelitian masa depan (Agenda Penelitian) harus berkonsentrasi pada faktor penghambat (RQ2), yaitu kompetensi manajemen dan budaya organisasi, sebagai prasyarat keberhasilan teknologi. Fokus penelitian harus beralih dari menguji variabel SIA secara parsial.

Identifikasi Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Literatur empiris yang dikumpulkan (RQ1) secara luas telah mengonfirmasi bahwa variabel SIA, seperti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI), berdampak positif pada kualitas laporan keuangan. Namun, penelitian ini seringkali bersifat parsial (berfokus pada satu area atau satu variabel) dan menghasilkan hasil yang tidak konsisten tentang seberapa signifikan pengaruh variabel SIA. Salah satu kekurangan utama—atau kelangkaan penelitian—yang dihasilkan dari sintesis SLR ini adalah bahwa tidak banyak penelitian yang menggunakan metode meta-analisis atau sintesis sistematis yang dapat mencapai kesimpulan yang komprehensif tentang variabel mana yang secara umum dominan dalam konteks pemerintahan daerah dan desa. Ini menimbulkan keraguan bagi para pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penelitian SLR ini mengisi celah dengan (1) menggabungkan hasil kuantitatif untuk mengidentifikasi variabel SIA yang paling penting, dan (2) mengkontekstualisasikan kegagalan SIA melalui analisis tantangan (RQ2). Ini membuka jalan untuk membangun agenda penelitian masa depan yang berfokus pada pengujian faktor Humanware dan Orgware sebagai prasyarat keberhasilan Software SIA.

Agenda Penelitian Masa Depan

Mengalihkan Fokus ke Faktor *Humanware* dan *Orgware*

Salah satu manfaat utama dari Tinjauan Literatur Sistematis ini adalah pembentukan Agenda Penelitian Masa Depan. Agenda ini harus beralih dari menguji secara parsial hubungan variabel SIA ke mempelajari faktor non-SIA (Humanware dan Orgware) yang telah terbukti menjadi penghambat utama Akuntabilitas (RQ2). Setelah menemukan celah, para peneliti disarankan untuk memprioritaskan topik-topik berikut. Yang pertama adalah Meta-Analisis Kemampuan Aparatur Sektor Publik. Ini adalah jenis penelitian yang menggabungkan dan menganalisis statistik hasil studi empiris tentang kemampuan sumber daya manusia di berbagai tingkat pemerintahan untuk menghasilkan ukuran pengaruh agregat, atau efek universal, terhadap kualitas laporan keuangan. Kedua, kami melihat Model Mediasi/Moderasi Komitmen Pimpinan. Dalam model ini, komitmen organisasi, juga dikenal sebagai komitmen organisasi, dianggap sebagai variabel moderator dan berfungsi untuk memperkuat atau melemahkan hubungan antara kualitas sistem SIA dan akuntabilitas. Ketiga, kami melakukan penelitian tentang peran etika pekerja dan budaya organisasi dalam praktik pelaporan SIA. Kami berkonsentrasi pada bagaimana nilai-nilai etis memengaruhi integritas data, penggunaan Audit Trail, dan pengambilan keputusan berbasis sistem, terutama dalam hal pencegahan penipuan.

Eksplorasi Metode Lanjutan dan Teknologi Disrupsi

Agenda Penelitian Masa Depan harus mencakup elemen metodologi dan teknologi inovatif selain fokus variabel. Untuk melampaui kemampuan sistem saat ini seperti SIPD, diperlukan penyelidikan mendalam tentang adopsi teknologi disrupsi dalam SIA, seperti mengevaluasi apakah menggunakan Blockchain atau Big Data Analytics akan lebih menguntungkan untuk meningkatkan keamanan data, transparansi transaksi, dan mewujudkan akuntabilitas real-time yang sebenarnya. Selain itu, penelitian lanjutan harus menggunakan Action Research, yaitu studi intervensi yang bertujuan untuk membuat dan menguji program pelatihan atau perubahan proses kerja yang spesifik untuk mengatasi hambatan penggunaan SIA di unit pelaksana. Ini akan dilakukan sebagai tanggapan terhadap tantangan implementasi (RQ2) yang berakar pada resistensi pengguna dan budaya. Penelitian akuntansi sektor publik di masa depan dapat memberikan kontribusi kebijakan yang jauh lebih efektif dalam mendorong Good Governance di Indonesia dengan mengintegrasikan elemen humanware dan orgware dengan teknologi maju melalui metode penelitian yang lebih komprehensif.

Implikasi Praktis

Hasil SLR ini memiliki konsekuensi praktis bagi pemerintah pusat dan daerah yang menangani pengelolaan keuangan publik. Fokus investasi SIA harus beralih dari fokus tunggal pada infrastruktur hardware dan software (seperti server dan update aplikasi) ke pengembangan humanware dan

orgware. Secara khusus, pemerintah disarankan untuk: (1) Memperbaiki program pelatihan aparatur dengan mengutamakan pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Etika Akuntabilitas serta elemen teknis input data (penggunaan fitur sistem). (2) Menciptakan sistem insentif dan sanksi yang jelas untuk mendorong kepatuhan terhadap prosedur SIA dan Sistem Pengendalian Internal; dan (3) Menjadikan komitmen organisasi sebagai indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) dalam penggunaan sistem dan (4) Menggunakan output SIA (Laporan Keuangan) sebagai alat manajemen kinerja yang sebenarnya, bukan hanya dokumen kepatuhan, untuk menjamin bahwa kinerja sistem akan diawasi dengan baik dan diawasi dengan baik.

KESIMPULAN

Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) ini menegaskan peran Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai katalisator esensial dalam mewujudkan *Good Governance* dan Akuntabilitas Sektor Publik. Menjawab RQ1, sintesis tematik menunjukkan bahwa dimensi SIA yang paling signifikan memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (sebagai *output* akuntabilitas) adalah Kompetensi Aparatur, Kualitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terintegrasi di dalam SIA, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SIA yang efektif berfungsi sebagai mediator yang mengurangi asimetri informasi dan biaya keagenan melalui fitur-fitur seperti *Audit Trail* dan kontrol sistem otomatis. Namun, studi ini juga menjawab RQ2 dengan mengidentifikasi bahwa pencapaian *real-time accountability* di Indonesia terhambat oleh tantangan yang bersifat manajerial dan kultural, khususnya kurangnya komitmen pimpinan terhadap penggunaan sistem secara utuh, resistensi pengguna terhadap perubahan proses, dan rendahnya etika atau integritas aparatur yang menghambat transparansi sejati. Dengan demikian, SIA hanya akan menjadi katalisator efektif apabila pemerintah mengalihkan fokus investasi dari sekadar infrastruktur teknologi menjadi penguatan faktor Humanware dan Orgware, sebuah kesimpulan yang menjadi dasar bagi perumusan Agenda Penelitian Masa Depan yang terfokus pada meta-analisis kompetensi dan pengujian model komitmen pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, P., Bina, U., Palembang, D., Akuntansi, P., Bina, U., & Palembang, D. (2018). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDESA) Pada Kantor Desa Cempaka Sakti Melia Ruspiana 1*, Siti Nurhayati Nafsiah 2 2. 632–645.
- Anriva, D. H. (2024). *TANTANGAN DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DI INDONESIA : SEBUAH ANALISIS TEMATIK*. 13(2), 97–109.
- April, N., Afandi, M. T., & Munir, A. M. (2025). *Integrasi Audit Trail dan Pengendalian Internal Terhadap Loyalitas Anggota Koperasi*. 3(4), 67–75.
- Hida, R., Utami, S., & Berliani, K. (2024). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah , Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022)*. 13(2), 265–273.
- Inovasi, J., & Publik, S. (2025). *No Title*. 5(3), 1–14.
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2024). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. 2, 720–728.
- Kamilah, A., Lubis, N., Sembiring, Y., Yull, F., Martha, D., & Ilham, R. (2025). *Analisis Efektivitas Penggunaan SIPD dalam Mendukung Transparansi Keuangan pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara , Kota Padangsidimpuan , Provinsi Sumatera Utara transparan , akuntabel , efisien , dan efektif guna mewujudkan pemerintahan yang bersih Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 (Asrif 2019). SIPD merupakan sistem yang data pemerintah pusat secara real-time , sehingga mendukung perencanaan dan penganggaran di seluruh level pemerintahan secara digital dan akurat . Sistem ini memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kegiatan*. 6(1), 43–72.
- Koordinator, K., & Perekonomian, B. (2022). *Pedoman umum governansi sektor publik indonesia (pug-spi)*.
- Kurniawan, L., & Shahab, A. R. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Sistem Informasi Akuntansi Dan Kualitas Sistem Akuntansi : Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir Accounting Information*

- Systems and Accounting System Quality : Its Effect on End User Satisfaction Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 7(November), 1–13.
- Lenggono, T. O., Pasamba, E. M., Studi, P., Kampus, D., & Universitas, U. (2025). THE EFFECT OF IMPLEMENTATION GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS , ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND APPARATUS. 9(71), 195–206.
- Manajemen, J., Sulisty, A., & Kurniasih, D. (2024). *ProBisnis: Peran etika dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik pada situasi bencana di indonesia*. 16(6), 1–6.
- Maolani, D. Y., Nuraeni, A. S., Dellyani, A., Fikry, E., & Huda, A. (2023). *Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance di indonesia*. 21(2), 1–7.
- Penelitian, P., & Ekonomi, B. (2020). DI PROVINSI JAWA BARAT THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASE GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM IN WEST JAVA PROVINCE *Venti Eka Satya Abstrak Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang (UU) di bidang keuangan negara pada tahun 2003 dan 2004 . UU tersebut mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (good governance), serta penerapan international best practices yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia . Reformasi keuangan negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah . Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan negara berupa laporan keuangan pemerintah yang setidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran , neraca , laporan arus kas , dan catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya . 1 Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu tuntutan dari pelaksanaan New Public Management (NPM). Menurut Mardiasmo , pendekatan NPM telah menimbulkan perubahan pada sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku , birokratis , dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan berpihak kepada kepentingan pasar . Model NPM berfokus pada pengelolaan sektor publik yang berorientasi pada kinerja . 2 Reformasi bidang pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sejak tahun 2005 . Demi tercapainya efisiensi , efektivitas , transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah , maka pelaporan pengelolaan keuangan daerah harus mencerminkan tujuan pengelolaan keuangan negara . Untuk itu , pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 . Akuntansi berbasis akrual ini merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan negara . Salah satu hasil studi International Federation of Accounting (IFAC) Public Sector Committee pada tahun 2002 menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan , efisiensi , dan pencapaian tujuan . 3 Dengan pelaporan berbasis akrual , posisi keuangan pemerintah daerah dan perubahannya serta bagaimana pemerintah daerah mendanai kegiatannya dapat diidentifikasi dan diukur secara tepat . Selain itu , dengan akuntansi berbasis akrual pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber*
- Prabhawa, W., & Prasajo, E. (2021). *Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution Pendahuluan Supreme Audit Institution (SAI) merupakan elemen vital dari sistem formal akuntabilitas keuangan di banyak negara . SAI merupakan “ watchdog ” yang menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik (OECD , 2011) . Sebagai buah karya konstitusi , SAI sangatlah bervariasi dalam hal struktur , profesionalisme , ukuran , independensi sumber daya dan transparansi di setiap negara (Gustavson , 2015) . SAI dianggap basis integritas dalam melawan korupsi dan memastikan transparansi dana publik , akuntabilitas keuangan dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis (Blume & Voigt , 2011 ; Noussi , 2012 ; Tackett , 2010) . SAI harus menerapkan standar audit yang adaptable dengan dinamika lingkungan (González-Díaz & García- Fernández , 2018) . Terkait model SAI , dikenal tiga bentuk yaitu the parliamentary atau monocratic model , the court of account model , dan the collegiate model (DFID , 2004 ; González-Díaz , García- Fernández , & López-Díaz , 2012 ; Santiso , 2008 ; Stapenburs & Titsworth , 2001) . Integritas bahasa latinnya ‘ integer ’ yang bermakna konsistensi dalam tindakan / prinsip ataupun bermakna mutu , sifat atau keadaan menunjukkan kesatuan utuh yang memunculkan kewibawaan (Darmayanti , 2020) . Menurut Endro (2017) , konstruksi mengembalikan nilai fundamental integritas melalui dua pilar , yaitu pemahaman hubungan dan tindakan moral (proses partisipasi eksternal) dan pemahaman konsep diri (proses pengendalian internal) . Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan SAI di Indonesia berdasarkan UUD 1945 (BPK , 2017) . Pada 1 Januari 1947 , saat revolusi fisik ,*

BPK resmi terbentuk dengan kantor awal di Magelang sebagai alih fungsi *Algemeene Rekenkamer*, yaitu lembaga audit kolonial Hindia Belanda (BPK, 2012, 2019). Dinamika lingkungan BPK dan reformasi mendorong penyempurnaan susunan keanggotaan BPK. Mulanya hanya terdiri dari dua pimpinan, berubah menjadi tujuh pimpinan, hingga saat ini menjadi sembilan pimpinan kolektif-kolegial (BPHN, 2018; BPK, 2012, 2019; Illahi & Alia, 2017). Terkait bentuk badan, BPK menggunakan *the Board (Collegiate)* model, seperti halnya Jepang, Korea, Jerman, Belanda dan Argentina (Chêne, 2018; Illahi & Alia, 2017). Sedangkan pelaksanaan fungsinya, BPK mengadopsi *best practices* piramida kematangan SAI dari *International Organization of Supreme Audit Institutions* (Akebar, 2018). Piramida kematangan S.... 8090, 1–17.

- Publik, D. S. (2025). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Peran Sistem Informasi Akuntansi Dalam Tata Kelola Keuangan Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. 25(2), 57–66.
- Ramadhan, A. Z., Barat, J., Daerah, P., Gresik, K., & Jawa, P. (n.d.). *Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Affiliation: Email: 143–157*.
- Siahay, A. Z. D. (2024). *Building Public Trust through Transparency and Accountability: A Systematic Review of the Role of Public Sector Accounting*. 423–430.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)*. 12(1), 50–58.
- Tasmiah, B., & Febriani, D. (2024). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana infaq terhadap minat masyarakat berinfaq*. 7(3), 326–340. <https://doi.org/10.22219/jaa.v7i3.33220>
- Terakreditasi, A., Dan, C., Habibatulloh, K. N., Widodo, S., & Murni, T. (n.d.). *Studi Tentang Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Sekolah Dan Kualitas Layanan Pendidikan Di SMA Negeri Kabupaten Kaur Yang*. 303–328.